

KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GOLKAR PARADIGMA BARU KEPEMIMPINAN ABURIZAL BAKRIE 2009 - 2013

Khoiruddin Muchtar

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung
Jl. AH Nasution No. 105 Bandung, Jawa Barat, Telp.(022) 7810788, HP 081312255522
email: khoiruddin09@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 7 Oktober 2013, disetujui pada tanggal 14 November 2013

GOLKAR PARTY'S POLITICAL COMMUNICATIONS THE NEW PARADIGM BAKRIE LEADERSHIP 2009-2013

Abstract

This study base on the efforts of the Golkar Party's to the process of interpretation, socialization, and implementation of the new paradigm, the paradigm guide to reformations Golkar Party's become to democratic, independent, solid, strong, fundamental, and responsive. How Golkar party's political communication about socialization and implementation of a new paradigm of Golkar Party's leadership Aburizal Bakrie-year period from 2009 to 2012. The aim of this research is to study and overview of the process of socialization and implementation new paradigm Golkar Party's of the Aburizal Bakrie's leadership. This contect described to using constructivist paradigm through the theory of Performance of Communication and Structuration. Research using the case study method. Data obtained by participation observer, unstructured interviews, and documentary study. The data also collected from informants. The results of this research show: 1) The Golkar Party's has a very significant infrastructure, so the making easier to socialization new paradigm to internal party, but Golkar Party's can not erase stigma society as the New Order party. Socializing new paradigm Golkar Party's to be done in integrated, systematic and continuous addressed to all cadres of various levels from the center to the village. 2) the new paradigm Golkar Party's ideals as the basis and foundation values stand for the Golkar Party's, the implementation is faced with the reality of the condition of the various political considerations and the interests of power, so it can not shown the Golkar Party's political communication with the direction of the reality, Golkar Party's must be have to political communication with the role of multi faces.

Keywords: *politic communication, Golkar Party's, Aburizal Bakrie.*

Abstrak

Penelitian ini didasari atas upaya Partai Golkar dalam melakukan proses pemaknaan, sosialisasi, dan implementasi paradigma baru, paradigma tersebut merupakan pedoman pembaruan yang mengarahkan Patai Golkar agar menjadi partai yang demokratis, mandiri, solid, kuat, berakar, dan responsip. Bagaimanakah komunikasi politik Partai Golkar tentang sosialisasi dan implementasi paradigma baru Partai Golkar masa kepemimpinan Aburizal Bakrie tahun 2009 – 2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memperoleh gambaran tentang proses sosialisasi dan implementasi paradigma baru Partai Golkar masa kepemimpinan saat ini. Persoalan tersebut dijelaskan dengan menggunakan paradigma konstruktivis melalui teori Performa Komunikasi dan Strukturasi. Metode penelitian menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan

data dilakukan dengan pengamatan berperan serta, wawancara, dan studi dokumentasi. Pengumpulan data juga dilakukan melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Partai Golkar memiliki infrastruktur partai yang sangat kuat, sehingga memudahkan untuk melakukan sosialisasi paradigma baru di lingkungan internal partainya, namun Partai Golkar sendiri belum sepenuhnya dapat menghapus stigma negatif masyarakat yang memandang Partai Golkar sebagai partai Orde Baru. 2) Idealitas paradigma baru Partai Golkar sebagai nilai dasar dan landasan berpijak bagi Partai Golkar, dalam implementasinya berhadapan dengan realitas politik yang sarat dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan kekuasaan, sehingga Partai Golkar tidak bisa menampilkan komunikasi politiknya secara statis dengan arah yang berhadapan-hadapan.

Kata kunci: komunikasi politik, Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

PENDAHULUAN

Partai Golkar merupakan partai yang dibina dan dibesarkan oleh Orde Baru sekaligus sebagai partai pendukung dan mesin politiknya pemerintahan Orde Baru, terjadinya reformasi bagi Partai Golkar justru awal datangnya persoalan-persoalan baru, karena masa itu Partai Golkar dianggap berperan banyak dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik di pemerintahan. Pada masa transisi tersebut, Partai Golkar menghadapi berbagai macam tantangan dan tuntutan pembubaran dari berbagai pihak sebagai akibat dosa-dosa politik masa lalu.

Sejarah masa lalu Partai Golkar yang dipenuhi dengan hegemoni kekuasaan, penekanan, keserakahan, dan pemasangan demokrasi menjadi suatu tantangan tersendiri, sehingga Partai Golkar harus berjibaku memperbaiki citra dirinya. Pencitraan partai merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan oleh Partai Golkar untuk mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat, terutama dalam masa transisi tersebut. Pada masa ini Partai Golkar terus berusaha menunjukkan dan menawarkan pemikiran-pemikiran pembaharuan yang menarik agar dapat memikat simpati masyarakat, sehingga menimbulkan keyakinan terhadap keseriusan Partai Golkar dalam membangun partai dengan kekuatan pilar demokrasi.

Pembaharuan Partai Golkar dalam aplikasinya memerlukan internalisasi dan sosialisasi di kalangan pemuka, fungsionaris, pendukung, dan simpatisan Partai Golkar.

Paradigma baru Partai Golkar di samping sebagai upaya membentuk pemikiran baru yang berwawasan kebangsaan dan kerakyatan, pada implikasinya adalah berupaya untuk membangun eksistensi dan citra partai dengan melihat kesetaraan dengan partai-partai baru yang mengatasnamakan partai reformis. Paradigma baru Partai Golkar merupakan pemikiran baru dan strategi komunikasi politik Partai Golkar untuk bersaing dalam kompetisi pemenangan Pemilu. Dinamika komunikasi politik Partai Golkar dalam perjalanan mempertahankan eksistensi partai di tengah hujatan dan tuntutan pembubaran bagi partai ini merupakan ujian berat, sehingga sebagian besar pengamat memprediksi, bahwa Partai Golkar tidak akan bisa bertahan hidup, dan lonceng kematian Partai Golkar akan segera berbunyi.

Paradigma baru Partai Golkar dicetuskan pertama kali bermaksud untuk merespon tuntutan reformasi yang sedang berkembang di masyarakat. Paradigma baru telah disepakati untuk dijadikan pedoman dalam melakukan berbagai aktivitas politik para kader Partai Golkar. Paradigma baru Partai Golkar sendiri dimaknai oleh para kader Partai Golkar sesuai dengan konteks kehidupan masing-masing generasi kepengurusan, mulai masa kepengurusan Akbar Tandjung, kepengurusan Jusuf Kalla, dan masa kepengurusan sekarang.

Pemaknaan komunikasi politik Partai Golkar, sosialisasi paradigma baru Partai Golkar, dan implementasi paradigma baru Partai Golkar pada masa kepemimpinan

Aburizal Bakrie tahun 2009-2012, merupakan fenomena yang akan menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini juga ingin menemukan bagaimanakah model komunikasi politik yang dilakukan Partai Golkar dalam proses sosialisasi dan implementasi paradigma barunya.

Berdasar latar belakang penelitian tersebut, maka fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimanakah komunikasi politik Partai Golkar tentang sosialisasi dan implementasi paradigma baru Partai Golkar masa kepemimpinan Aburizal Bakrie tahun 2009 – 2012.

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka diidentifikasi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimana pemaknaan komunikasi politik Partai Golkar dalam perspektif paradigma baru yang meliputi makna perubahan paradigma, demokratisasi, kekuasaan, dan komunikasi politik efektif yang menjadi nilai dasar dan landasan melakukan komunikasi politik?; (2) Bagaimana gambaran tentang proses sosialisasi paradigma baru Partai Golkar dalam aktivitas komunikasi politik masa kepemimpinan Aburizal Bakrie tahun 2009 - 2012?; (3) Bagaimana gambaran tentang proses implementasi paradigma baru Partai Golkar dalam aktivitas komunikasi politik pada masa kepemimpinan Aburizal Bakrie tahun 2009 – 2012?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memperoleh gambaran tentang proses sosialisasi dan implementasi paradigma baru Partai Golkar masa kepemimpinan saat ini. Persoalan tersebut dijelaskan dengan menggunakan paradigma konstruktivis melalui teori Performa Komunikasi dan Strukturasi.

Kegunaan secara akademik dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi, utamanya adalah komunikasi politik terkait dengan sosialisasi pembaruan partai politik dan implementasinya dalam aktivitas politik Partai Golkar. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjelaskan model komunikasi yang dilakukan fungsionaris Partai Golkar dalam memengaruhi dan merebut kepercayaan masa, sehingga mampu mempertahankan eksistensi

partai.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman dan pandangan bagi para aktivis dan praktisi politik dalam melakukan komunikasi dengan baik dan tepat dalam berbagai momen kegiatan politik, mampu melakukan sosialisasi ide-ide pembaruan dengan tepat sesuai dengan momen dan sasaran. Diharapkan pula mampu memberikan kontribusi bagi praktisi politik dalam mendekati massa, memengaruhi massa, membangun relasi dengan tokoh dan pemuka masyarakat, serta mengajaknya untuk memilih partai politik.

LANDASAN KONSEP

Kajian Pustaka

Komunikasi Politik, Sosialisasi, dan Implementasi

Komunikasi politik merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari budaya politik dan sosialisasi politik. Bila berbicara tentang budaya politik dan sosialisasi politik, maka akan berbicara pula tentang komunikasi politik, sehingga komunikasi politik merupakan fungsi sosialisasi dan budaya politik. Dalam analisis sistem politik, maka yang menjadi perhatian adalah struktur-struktur yang melaksanakan fungsi politik, dan bagaimana komunikasi tersebut dilaksanakan.

Komunikasi politik dalam prosesnya tidak terlepas dari unsur-unsur komunikasi pada umumnya. Komunikasi politik berlangsung dalam suatu proses penyampaian pesan-pesan yang berasal dari sumber, selaku komunikator yang memrakarsai komunikasi kepada khalayak dengan menggunakan suatu media. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar terjadinya aktivitas komunikasi politik dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan implementasi paradigma baru Partai Golkar.

Melihat peranannya sebagai organisasi kemasyarakatan, partai politik mempunyai beberapa fungsi. Fungsi-fungsi partai politik tersebut adalah sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sebagai alat

penengah pertikaian. Partai politik di negara-negara komunis mempunyai fungsi-fungsi berbeda dengan fungsi-fungsi tersebut. Partai-partai politik di negara-negara totaliter berfungsi sebagai alat untuk mencapai kesatuan dan keseragaman, sebagai satu-satunya mobilisator massa menuju tujuan ideologi partai (Budiardjo, 2005).

Memerhatikan pengertian dan fungsi partai, maka sejatinya ketiga hal tersebut sarat dengan muatan-muatan aspek komunikasi, sehingga sejalan dengan fungsi komunikasi politik itu sendiri, yaitu untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas usaha-usaha yang dilakukan lembaga politik dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai kebijakan, program, dan tujuan lembaga politik, memberi motivasi kepada politisi, fungsionaris dan pendukung partai politik, serta mendidik masyarakat dengan pemberian informasi dan sosialisasi tentang cara-cara melakukan pemilihan umum sebagai sarana penyampaian hak suara.

Sosialisasi merupakan proses seorang individu belajar berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, norma, dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat dkk, 1984), sedangkan komunikasi merupakan proses interaksi karena adanya stimulus yang memiliki arti tertentu dan dijawab oleh orang lain, baik secara lisan, tertulis, maupun aba-aba, menghasilkan interaksi sosial yang memungkinkan adanya kontak sosial (Winangsih Syam, 2009). Komunikasi terjadi melalui kontak sosial, yaitu seluruh pertukaran sosial dan pertukaran sistem nilai.

Sosialisasi politik merupakan proses sosialisasi yang terfokus kepada persoalan politik, seperti dijelaskan Sigel, bahwa sosiologi politik adalah proses belajar yang terkait dengan norma politik yang dapat dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya untuk menerima suatu sistem politik yang sedang berlangsung (Soemarno, 2002). Sosialisasi politik merupakan suatu proses transformasi nilai-nilai yang diikuti dengan sikap politik melalui proses belajar.

Implementasi bisa dimaknai sebagai

pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky melihat implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky berpandangan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, sedangkan McLaughlin memberikan pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan (Yusuf, 2012). Adapun Schubert mengemukakan bahwa implementasi adalah sistem rekayasa (Nurdin dan Usman, 2002).

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek. Paradigma baru merupakan pola pemikiran baru yang dicetuskan Partai Golkar pascareformasi, paradigma ini dijadikan sebagai acuan norma dan landasan Partai Golkar dalam melakukan aktivitas politiknya sampai saat ini. Semua sikap dan perilaku berupaya sejalan dengan semangat Partai Golkar paradigma baru.

Kerangka Pemikiran

Landasan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Performa Komunikatif, teori ini menyatakan bahwa, anggota organisasi melakukan performa komunikasi tertentu yang berakibat pada munculnya budaya organisasi.

Teori Strukturasi merupakan salah satu teori yang digunakan dalam penelitian ini, teori ini diperkenalkan sosiolog Anthony Giddens tahun 1979, dalam penelitiannya Giddens mendiskripsikan tentang institusi sosial kelompok dan organisasi diproduksi, direproduksi, dan ditransformasi melalui penggunaan aturan-aturan sosial. Aturan-aturan yang dibuat kelompok berfungsi bagi perilaku para anggotanya. Giddens memandang struktur sosial sebagai pedang bermata dua, struktur dan aturan yang

diciptakan membatasi perilaku anggota organisasi dan kelompok, akan tetapi aturan yang sama membuat anggota mampu memahami dan berinteraksi dengan orang lain (West dan Turner, 2008).

Partai Golkar sebagai institusi partai politik memiliki aturan-aturan baku yang diberlakukan bagi para anggotanya, aturan-aturan tersebut menjadi pengendali bagi perilaku kesehariannya sekaligus sebagai dasar untuk mengatur irama interaksi sesama anggota partai. Paradigma baru sebagai aturan baru pada awalnya juga mengalami adaptasi, sehingga setiap anggota partai akan berupaya memahami dan membiasakan diri dengan paradigma baru tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, dengan teknik analisis interpretif. Menurut Denzin dan Lincoln (2000) paradigma penelitian konstruktivis memiliki beberapa karakteristik di antaranya adalah: realitas bersifat relatif, artinya realitas yang ada dikonstruksi secara khusus dan bersifat lokal, subjektif, menghasilkan pengetahuan berdasarkan temuan di lapangan, termasuk temuan yang terjadi selama proses interaksi antara peneliti dan informan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif mempelajari fenomena yang berada dalam lingkungan alamiahnya, berupaya memahami atau menafsirkan fenomena berdasarkan makna-makna yang diberikan oleh peneliti tersebut (Denzin dan Lincoln, 2000). Penelitian ini bertumpu kepada proses pemaknaan terhadap konsepsi komunikasi politik yang berasaskan paradigma baru Partai Golkar, kemudian disosialisasikan lewat pesan-pesan komunikasi politik, penelitian ini bermaksud pula menganalisis model pemahaman dan pemaknaan paradigma baru Partai Golkar serta sosialisasi dan implementasinya dalam setiap aktivitas politik pada masa kepemimpinan saat ini.

Subjek penelitian ini adalah informan dari beberapa unsur, dimana pemilihan

informan dalam penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan keperluan atau kebutuhan penelitian, dalam penelitian kualitatif informan penelitian ditentukan dengan menetapkan secara langsung (purposif) sesuai dengan prinsip yang berlaku. Informan penelitian ini diambil dari beberapa unsur yang dianggap memiliki kesesuaian dengan pembahasan dalam penelitian ini. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu: 1 informan dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar Pusat, 6 informan dari Pengurus DPP Partai Golkar Pusat, 3 informan dari Pengurus DPD Tk.I Partai Golkar Provinsi, untuk perimbangan data diambil juga 2 informan partai lain dan 2 informan dari Pengamat Politik LIPI dan 1 informan dari Ketua Penasihat Badan Musyawarah Sunda (BAMUS) Tingkat Pusat. Pengurus PW MuhammadiyahJabar dan Sekretaris Umum MUI Jabar. Sedangkan objek penelitiannya adalah komunikasi politik Partai Golkar pada masa kepemimpinan Aburizal Bakrie 2009-2013.

Teknik pengumpulan data dibagi atas tiga bagian yaitu: pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pengamatan dilakukan dengan memerhatikan peristiwa-peristiwa komunikasi politik dalam berbagai kegiatan yang melibatkan fungsionaris dan kader Partai Golkar, penulis melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan yang terkait dengan pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pula studi dokumentasi, dengan menganalisis literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan sebagai data sekunder. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis lalu disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potret Partai Golkar Era Paradigma Baru Struktur Organisasi dan Pengurus Partai Golkar

Merujuk kepada Hasil Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009, Anggaran Dasar

Partai Golkar pada BAB VIII tentang Struktur Organisasi serta Wewenang dan Kewajiban Pimpinan, dinyatakan bahwa, Struktur Organisasi Partai Golkar terdiri atas tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

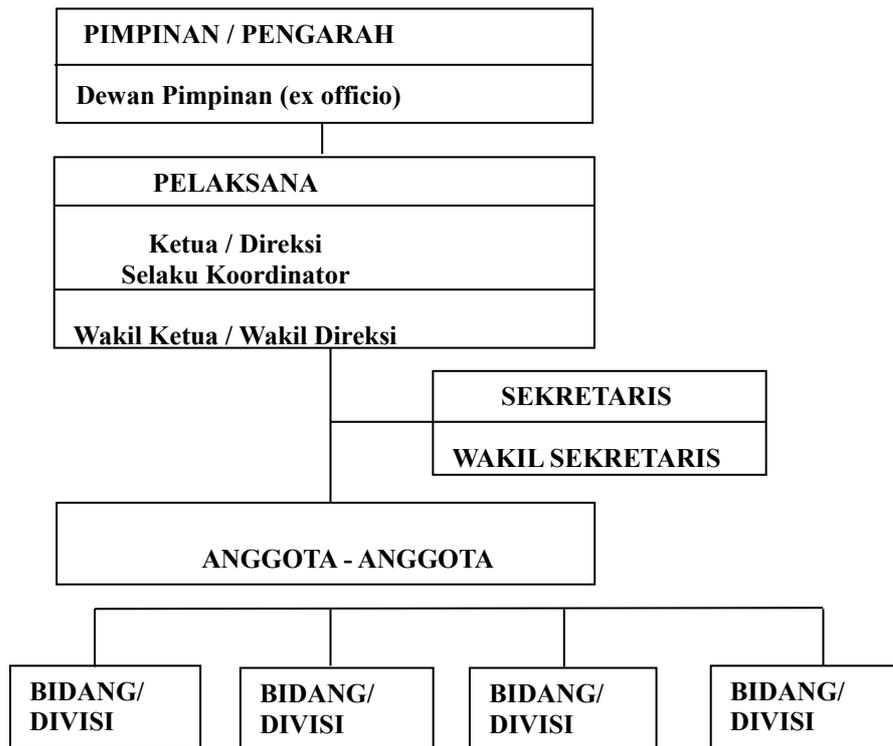
Program kerja pada masa kepemimpinan Ketua Umum sekarang ini mencoba menggunakan model organisasi/manajemen matrik, organisasi matrik disebut juga organisasi manajemen proyek yaitu penggunaan struktur organisasi secara bersinergi antara satu bidang dengan bidang lainnya. Masing-masing Korbit yang mempunyai keterampilan dari berbagai bidang dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek dalam jangka waktu tertentu. Organisasi matrik digunakan berdasarkan struktur organisasi staf dan lini khususnya di bagian penelitian dan pengembangan.

Perbandingan antara Paradigma Baru dan Lama Partai Golkar

Partai Golkar sebagai partai berpengalaman berupaya mencari inisiatif dan solusi untuk mempertahankan eksistensinya dengan berupaya mencari format baru dalam berorganisasi yang lebih demokratis. Partai Golkar ingin memperlihatkan bahwa Partai Golkar lama dan Partai Golkar baru benar-benar berbeda, perbedaan itu bisa dilihat di tabel 1.

Paradigma Baru dalam Tiga Kepemimpinan Partai Golkar

Sebagai upaya menjaga eksistensinya, maka masing-masing pimpinan Partai Golkar melakukan interpretasi terhadap paradigma baru sesuai dengan konteks zaman yang dialaminya. Perbedaan ketiga pimpinan Partai Golkar ini dapat dilihat dalam tabel 2.



Sumber: Kumpulan PO, Juklak dan Keputusan DPP Partai Golkar 2009-2015. Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tahun 2010

Gambar 1
Struktur Organisasi Badan dan Lembaga di Lingkungan Partai Golkar

Tabel 1
Perbandingan Paradigma Lama dan Baru Partai Golkar

Paradigma Lama	Paradigma Baru	Keterangan
Dewan Pembina memiliki kewenangan mutlak	Institusi Dewan Pembina dihapuskan	Dewan Pembina melalui Munaslub Partai Golkar 1998 diganti dengan penasihat yang hanya berfungsi memberikan saran-saran
Pengambilan keputusan bersifat <i>top-down</i> dengan melibatkan tiga jalur, ABRI-Birokrasi-Golkar	Pengambilan keputusan bersifat demokratis <i>bottom-up</i> . Tiga jalur ABG dihapuskan karena menghalangi mekanisme pengambilan keputusan demokratis	DPD I dan DPD II diberi hak penuh dalam pengambilan keputusan pada Munas dan kebijakan strategis lain.
Pola rekrutmen kepengurusan dipengaruhi oleh kedekatan politik dan nepotisme	Standardisasi yang lebih jelas dalam rekrutmen kepengurusan Partai Golkar dengan mengedepankan <i>merit system</i> (dedikasi, prestasi, loyalitas, dan kecakapan)	Sejak Munaslub pemilihan pimpinan berdasarkan suara dari DPD-DPD
Partai Golkar tidak otonom, terutama dari militer dan birokrasi.	Partai Golkar bersifat independen dan mandiri. Otonomi diwujudkan dengan penghapusan tiga jalur ABG.	Partai Golkar di era reformasi menempatkan dukungan rakyat sebagai sumber utama kekuatan.
Pola kepemimpinan bersifat sentralistik. Posisi Ketua Umum lebih sebagai pelaksana dari keputusan Dewan Pembina	Kepemimpinan Partai Golkar bersifat kolegial	Ketua Umum memiliki posisi yang menentukan, namun tetap berdasarkan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat demokratis kolegial.

Sumber: Tandjung, 2007.

Tabel 2
Program Pembaruan Partai Golkar di Tiga Era Kepemimpinan

1.	Demokratisasi	Menata struktur organisasi partai menjadi lebih demokratis dan menentukan calon presiden dengan program konvensi	Menginginkan demokratisasi yang efisien dan tidak dengan ongkos yang mahal. Meniadakan Konvensi karena dianggap tidak efektif.	Melakukan survei untuk menentukan calon presiden dan calon kepala daerah dari Partai Golkar.
2.	Kemandirian	Menjadikan Partai Golkar sebagai partai yang berorientasi pasar dan berupaya melepaskan ketergantungan dari jalur AB.	Berupaya membangun kemandirian ekonomi	Mengedepankan kemandirian politik, sehingga manuver-manuver yang dijalankan mudah dipahami oleh rakyat. Berkoalisi dengan pemerintah SBY dengan tetap kritis.
3.	Kekuatan dan Soliditas	Menyatukan persepsi untuk membangun Partai Golkar dengan paradigma baru.	Berupaya memantapkan soliditas kepengurusan partai, namun di akhir kepengurusan terjadi keretakan.	Memantapkan konsolidasi partai dan melakukan pengaderan secara sistematis dan berkesinambungan.
4.	Berakar dan Responsif	Berusaha merespon tuntutan reformasi dengan membangun nilai-nilai baru yang lebih komunikatif dan egaliter.	Berupaya membangun ekonomi kerakyatan dengan program peningkatan kesejahteraan rakyat	Mengeluarkan semboyan "Suara Golkar Suara Rakyat" dengan tekad membangun Indonesia dari desa".

Diolah dari berbagai sumber

Sosialisasi Paradigma Baru Partai Golkar sebagai Proses Komunikasi Politik

Sosialisasi paradigma baru Partai Golkar sering disampaikan di berbagai forum kegiatan Partai Golkar maupun dalam kegiatan yang bersifat konsolidasi, dalam kegiatan tersebut dijelaskan tentang program-program partai dan pemahaman tentang paradigma baru kepada para kader di berbagai level organisasi partai. Informasi tentang Partai Golkar itu disampaikan dengan maksud untuk menanamkan keyakinan kepada para kader, bahwa Partai Golkar betul-betul sebagai partai yang serius melakukan perubahan dan optimis untuk meraih kemenangan dalam Pemilu 2014.

Sosialisasi paradigma baru Partai Golkar disampaikan juga oleh para pengurus pada acara-acara Musda, Muscam, ataupun Musdes. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi momen untuk memberikan pemahaman kepada para peserta terkait dengan kondisi dinamika Partai Golkar, yaitu tentang program-program yang akan dilaksanakan, target yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang harus diambil oleh kader-kader di setiap level kepengurusan. Sosialisasi ini pada dasarnya mengajak kader-kader Partai Golkar untuk melakukan kerjasama secara solid, supaya ajakan ini dapat diterima dengan baik, maka perlu penyampaian secara santun dan menarik, sehingga dalam performa sosial merupakan sikap santun dan kesopanan untuk mendorong kerjasama di antara anggota organisasi (West dan Turner, 2008).

Partai Golkar mempunyai struktur pengurus mulai tingkat pusat sampai tingkat desa, desa inilah yang menjadi basis kekuatan untuk bergerak bagi Partai Golkar, terutama untuk melakukan penggalangan. Momen tersebut merupakan saat yang tepat untuk memasukkan atau menyosialisasikan nilai-nilai paradigma baru terutama kepada para pengurus Partai Golkar di tingkat DPD sampai desa. Kegiatan penggalangan yang dilakukan Partai Golkar merupakan performa politis sebagai perilaku organisasi yang mendemonstrasikan kekuasaan dan kontrol (West dan Turner, 2008). Para pengurus Partai Golkar berusaha meyakinkan kader-kadernya

dengan mencoba mendemonstrasikan kekuasaannya, bagaimana caranya sehingga konstituennya tidak pindah ke partai lain. Kekuasaan yang dimaksud bukan dengan memaksa untuk mengikuti Partai Golkar, namun Partai Golkar berupaya melakukan pendekatan dengan berbagai penawaran program-program pembaharuan yang memikat konstituen.

Pengaderan merupakan wahana sosialisasi politik, karena sosialisasi tersebut terfokus pada persoalan politik, seperti yang dijelaskan R.S. Sigel, bahwa sosialisasi politik adalah proses belajar yang terkait dengan norma politik yang dapat dialihkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya untuk menerima suatu sistem politik yang sedang berlangsung (Soemarno, 2002).

Pengaderan yang dilakukan Partai Golkar, jika dikaitkan dengan pendapat Pacanowsky dan Trujillo, masuk dalam katagori performa komunikasi enkulturasi yaitu perilaku organisasi yang membantu para karyawan (kader) dalam menemukan apa makna dari menjadi suatu anggota organisasi (West dan Turner, 2008).

Bila Partai Golkar mampu memberikan pemahaman dan mendorong para kadernya untuk bekerja sama dan bekerja keras untuk memperjuangkan Partai Golkar, maka besar kemungkinan Partai Golkar akan berhasil dalam melakukan pengaderan yang berujung kepada kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2014. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Partai Golkar harus menjaga semangat paradigma barunya sehingga tidak sampai ditinggalkan kader-kadernya.

The party of ideas merupakan bagian dari komunikasi politik Partai Golkar untuk menarik perhatian para kader dan khalayak, sehingga diharapkan mampu memengaruhinya. Sebagaimana dijelaskan Cangara (2009), komunikasi politik merupakan suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Partai Golkar menghendaki pertarungan gagasan ini menjadi tradisi yang terus dikembangkan dalam komunitas Partai Golkar sebagai modal perjuangan untuk memajukan bangsa ke depan. Pembentukan tradisi pertarungan gagasan tersebut tidaklah mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan proses pembiasaan, sehingga Partai Golkar perlu menyiapkan fasilitas-fasilitas pendukung dan menciptakan suasana yang kondusif dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas proses pengaderan.

Sosialisasi paradigma baru Partai Golkar sering juga disampaikan lewat pidato politik Ketua Umum Partai Golkar yang sering diekspose oleh media massa. Pidato-pidato yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar lebih banyak menyampaikan konsistensi Partai Golkar sebagai partai pembaharu yang berideologi Pancasila, doktrin karya kekaryaannya dan pengembangan konsep paradigma barunya. Pidato tersebut juga menyampaikan cita-cita Partai Golkar dan program-program Partai Golkar ke depan, dalam pidato tersebut juga disampaikan penyikapan-penyikapan Partai Golkar terhadap persoalan-persoalan bangsa yang sedang berkembang saat ini, Partai Golkar juga menyatakan diri sebagai partai yang masih memiliki kepercayaan diri dan kekuatan serta pengaruh yang kuat dalam lingkup perpolitikan nasional.

Partai Golkar berusaha memengaruhi masyarakat dengan menawarkan program-program dan pemikiran baru, diharapkan dari penawaran ini akan muncul pandangan positif tentang Partai Golkar, sehingga akan memengaruhi terhadap pendapat dan perilaku masyarakat. Sebagaimana dinyatakan Roberts, bahwa komunikasi tidak secara langsung menimbulkan pendapat atau perilaku tertentu, tetapi cenderung memengaruhi cara khalayak mengorganisasikan citranya tentang lingkungan, dan citra itulah yang memengaruhi pendapat atau perilaku khalayak (Arifin, 2006).

Partai Golkar memiliki tiga ranah pendukung untuk membangun citra partainya yaitu di parlemen, di pemerintahan, dan di organisasi Partai Golkar sendiri. Di parlemen,

Partai Golkar cukup pandai memanfaatkan momen-momen tertentu untuk mendongkrak popularitasnya, meskipun Partai Golkar masuk dalam partai koalisi pemerintah, namun Partai Golkar masih berani melakukan manuver-manuver politik yang berseberangan dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintah. Kasus Century dan angket pajak misalnya, Partai Golkar berani berpendapat beda dengan partai-partai koalisi.

Namun di sisi lain ada persoalan yang menjadi faktor penghambat bagi langkah ketua umum yaitu masalah Lumpur Lapindo, begitu juga dengan peringkat hasil survei calon presiden yang tidak kunjung naik, dari fenomena ini, maka Partai Golkar harus mampu mengelola isu-isu negatif yang menyerang Partai Golkar dan Ketua Umumnya dengan melakukan langkah-langkah nyata, melalui program-program yang dapat menyentuh rakyat.

Implementasi Paradigma Baru Partai Golkar dalam Aktivitas Komunikasi Politik

Paradigma baru Partai Golkar dirumuskan sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku bagi kader Partai Golkar, sehingga konsistensi kader Partai Golkar ditandai dengan ketaatannya untuk menjadikan paradigma baru sebagai rujukan dalam implementasi kehidupan politiknya. Browne dan Wildavsky memandang implementasi sebagai perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin dan Usman, 2002). Implementasi paradigma baru sebagai pedoman Partai Golkar semestinya juga menjadi tempat penyesuaian dalam memandang setiap persoalan politik yang dihadapi Partai Golkar. Implementasi paradigma baru Partai Golkar dapat diamati dari proses demokratisasi, kemandirian, kekuatan dan berakar serta responsif partai terhadap persoalan-persoalan yang terkait dengan politik.

Masa kepemimpinan Partai Golkar saat ini, demokratisasi sudah mulai berangsur-angsur dijalankan oleh para pengurus Partai Golkar daerah, terutama dalam memilih para Ketua Umum mereka, DPP sendiri tidak turut

campur dalam menentukan pemilihan tersebut, DPP lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dalam setiap pemilihan ketua DPD kecuali kalau ada kasus-kasus tertentu. DPP menerapkan komunikasi politik yang menurut Nimmo (2008) berdasarkan konsekuensinya mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.

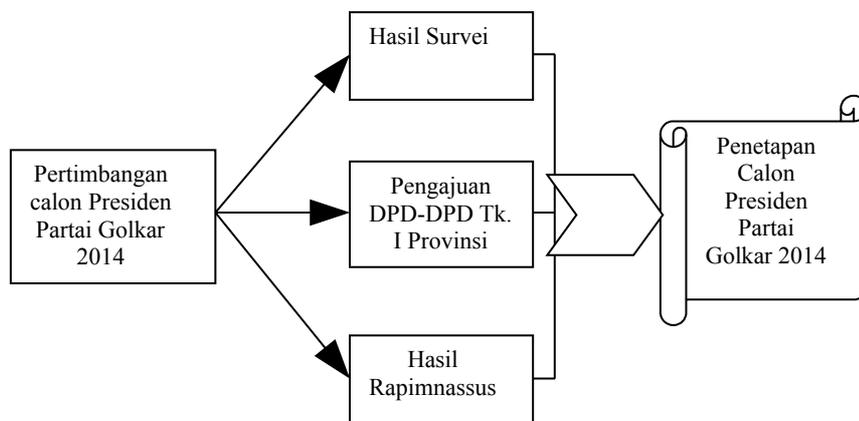
Pada kenyataannya penentuan calon kepala daerah dan presiden ini tidak bisa sepenuhnya dilakukan melalui metode survei, karena bila penetapan karena bila penetapan Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai calon presiden Partai Golkar sebenarnya tidak memenuhi syarat bila mengacu hanya kepada hasil survei, karena dalam beberapa survei yang dilakukan beberapa lembaga survei seperti, *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Lembaga Pengkajian Sumber Daya Manusia Indonesia (Lepsudami), dan survei yang dilakukan Partai Golkar sendiri menunjukkan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar ini selalu berada di bawah tokoh lain.

Memerhatikan pernyataan pengurus Partai Golkar sebelumnya yang menempatkan hasil survei sebagai pertimbangan utama dalam menentukan calon presiden, maka metode survei yang dijanjikan ini semestinya konsisten, tidak ada lagi alasan bagi kader Partai Golkar yang rendah elektabilitasnya untuk dicalonkan, bila Partai Golkar tetap mempertahankan kader yang rendah popularitasnya, maka Partai Golkar harus

bekerja keras meningkatkan elektabilitas Ketua Umumnya, karena fenomena ini telah menyalahi prinsip *public relation* seperti yang dijelaskan Kaid dan Holtz-Bacha (2008) bahwa, *public relations* selalu berusaha menyajikan objektivitas, kejujuran, dan informatif. Pada gambar 2 terlihat pertimbangan Partai Golkar dalam menentukan calon Presiden 2014.

Kemandirian Partai Golkar masa kepemimpinan saat ini dipertanyakan banyak kalangan, ketika Partai Golkar bergabung dengan Setgab Koalisi pendukung pemerintah, keputusan itu dianggap sebagai sikap yang tidak mandiri, karena Partai Golkar punya kecenderungan bergantung pada kekuatan orang lain dengan mengharap mendapat bagian kekuasaan di kabinet dan ternyata Partai Golkar juga mau ditawari jabatan menteri pada pos-pos tertentu. Padahal dalam salah satu pernyataan paradigma baru, Partai Golkar bertekad mengubah perilaku politik lama yang mengandalkan dari luar dirinya menjadi perilaku politik yang mencerminkan kemandirian.

Persoalan oposisi, Partai Golkar sendiri merasa sudah benar dengan sikap yang sudah diambilnya. Merujuk kepada *platform* paradigma baru yang menyatakan bahwa, Partai Golkar adalah partai moderat yang senantiasa mengambil posisi tengah dan menempuh garis moderasi, Partai Golkar juga



Sumber: diolah dari berbagai informasi

Gambar 2
Pertimbangan Penentuan Calon Presiden Partai Golkar 2014

konsisten mengembangkan wawasan keseimbangan (Hasil Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009, Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar 2009). Mengambil peran oposisi bagi Partai Golkar, dianggap tidak menguntungkan, tidak dapat memberdayakan kader partai untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan memang Partai Golkar tidak terbiasa meninggalkan pemerintahan. Keputusan bergabung dengan Partai Koalisi dianggap sebagai itikad baik untuk menciptakan perimbangan kekuatan di tengah-tengah partai koalisi, dengan masuknya Partai Golkar di koalisi partai pendukung pemerintah, maka tercipta suasana kompetitif di antara partai-partai koalisi.

Terbentuknya koalisi partai sebenarnya tidak menjamin terciptanya soliditas partai anggota koalisi, karena menurut Nimmo (2000) di dalamnya pasti akan ada pembicaraan politik yang tidak pernah bisa dipisahkan dengan perebutan dan pengaturan kekuasaan. Sehingga kepentingan politik akan mengalahkan koalisi apapun yang dibentuk oleh partai politik. Mengapa Partai Golkar berani berseberangan pendapat dengan partai koalisi lainnya, mungkin karena ada keuntungan yang lebih besar dari hanya sekedar berkoalisi. Koalisi sebagai struktur aturan yang dibuat partai gabungan, tidak sekuat struktur partai itu sendiri dan tidak ada ikatan kuat terhadap agen dalam struktur koalisi.

Sebagai partai tua yang sudah cukup mapan, Partai Golkar memiliki beberapa potensi kekuatan untuk memenangkan Pemilu mendatang, potensi-potensi itu adalah paradigma baru sebagai pedoman dalam interaksi politik, kekuatan infrastruktur dan hasil survei dari berbagai lembaga yang menyatakan bahwa, Partai Golkar berpotensi akan mendapatkan kemenangan dalam Pemilu Legislatif tahun 2014. Sedangkan proyeksi yang dilakukan untuk kemenangan Pemilu 2014 adalah mengupayakan rekrutmen dan pembinaan kader, serta mengupayakan kemenangan dalam setiap Pemilu.

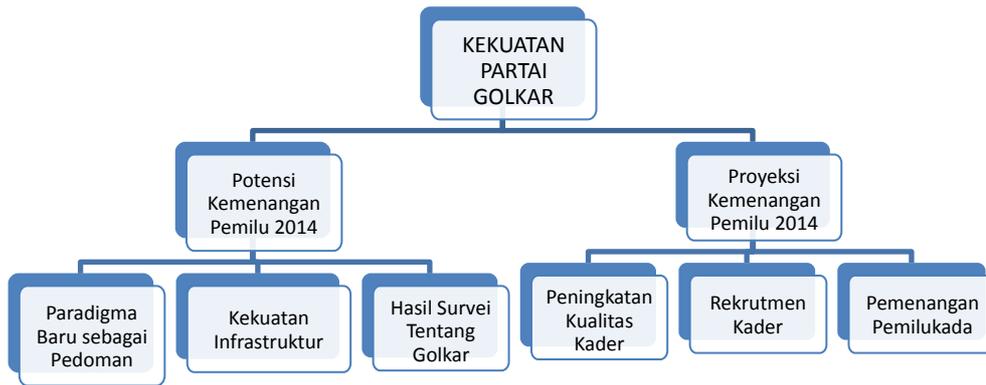
Berdasarkan survei yang dilakukan berbagai lembaga menyatakan bahwa, Partai

Golkar paling berpotensi untuk mendapatkan kemenangan pada Pemilu 2014, fenomena ini cukup memberikan semangat kepada Partai Golkar untuk terus melangkah dan membuat terobosan-terobosan baru. Kenyataan yang menggembirakan tersebut harus diapresiasi dengan tetap menjaga hubungan dan moralitas kader agar tidak tersangkut permasalahan-permasalahan yang akan menurunkan citra Partai Golkar.

Paradigma baru yang menjadi pedoman dan aturan merupakan energi baru bagi Partai Golkar untuk menggali potensi dan menyiapkan proyeksi kemenangan dalam Pemilu 2014. Giddens mendeskripsikan kelompok dan organisasi diproduksi, direproduksi, dan ditransformasi melalui penggunaan aturan-aturan sosial (West dan Turner, 2008). Untuk potensi dan proyeksi Partai Golkar ini dapat dilihat pada gambar 3.

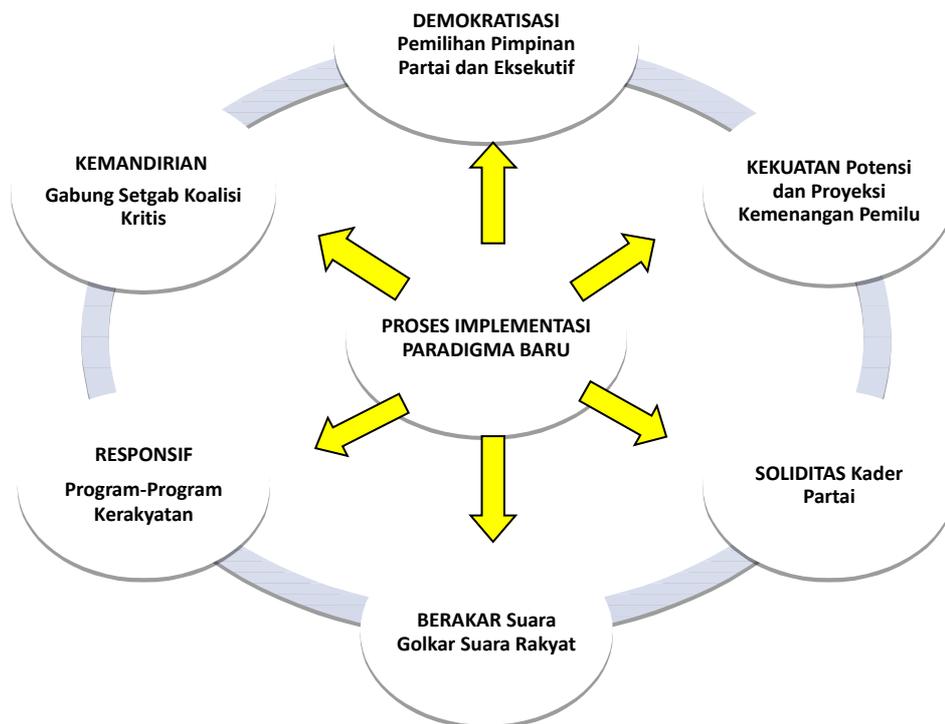
Mengakar dan responsif merupakan modal yang dimiliki Partai Golkar untuk melaksanakan komunikasi politik secara efektif. Untuk lebih menegaskan kedekatannya dengan rakyat, maka pada masa kepemimpinan sekarang ini Partai Golkar memunculkan motto "suara Golkar suara rakyat". Implementasi motto tersebut diperlihatkan Partai Golkar dengan melakukan kerja sama dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, Partai Golkar melakukan berbagai program kerakyatan mulai dari program pemberian bantuan kepada pengusaha kecil, pemberian santunan kepada masyarakat miskin, sampai pada bantuan musibah.

Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk membangun komunikasi dengan masyarakat bawah. Partai Golkar menyadari bahwa masyarakat pemilih di Indonesia, mayoritas berada pada golongan menengah ke bawah, sehingga untuk dapat meraih simpati dan suara harus melakukan pendekatan kepada mereka dengan menyentuh aspek-aspek kepentingannya dan mengerti dengan dunianya. Seperti dijelaskan Effendy (1986), komunikasi akan terjadi dan berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dibicarakan. Proses implementasi paradigma baru Partai Golkar digambarkan pada gambar 4.



Sumber: diolah dari berbagai sumber

Gambar 3
Potensi Kekuatan Partai Golkar untuk Pemenangan Pemilu 2014



Sumber: hasil penelitian

Gambar 4
Proses Implementasi Paradigma Baru Partai Golkar

Model Komunikasi Politik Partai Golkar dalam Proses Sosialisasi dan Implementasi Paradigma Baru

Model Komunikasi Politik Persuasif Terkendali dalam Proses Sosialisasi Paradigma Baru

Penyampaian paradigma baru Partai Golkar tidak akan berhasil bila dilakukan secara otoriter, pendekatan yang mesti dilakukan adalah dengan komunikasi persuasif dialogis, sehingga ditemukan kesamaan makna dalam memahami paradigma baru tersebut, sebagaimana dijelaskan Effendy (1986) bahwasanya komunikasi akan terjadi dan berlangsung selama ada kesamaan makna mengenai apa yang dibicarakan. Sosialisasi paradigma baru berada pada komunitas masyarakat sebagai makhluk dinamis dan selalu bergerak ke arah perbaikan dan pembaharuan. Fenomena ini mengharuskan Partai Golkar mampu memahami paradigma baru dalam konteks kekinian, artinya mampu melakukan sosialisasi dan adaptasi antara aturan-aturan paradigma baru dengan persoalan-persoalan yang dihadapi Partai Golkar saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan Soemarno (2002), pertemuan antara unsur dinamis memberi petunjuk, bahwa sosialisasi berada di tengah-tengah masyarakat yang bersifat dinamis dan bergerak ke arah kondisi yang lebih baik.

Konsolidasi yang dilakukan para pengurus Partai Golkar terhadap jajaran di bawahnya memungkinkan untuk bisa melakukan sosialisasi di sela-sela acaranya, dalam kesempatan tersebut ada peluang untuk melakukan komunikasi persuasif, dengan memberikan pembinaan yang mengarah kepada aspek-aspek paradigma baru, dengan pembinaan tersebut meskipun ada unsur-unsur instruksi, akan tetapi dengan penyampaian komunikasi secara persuasif, maksudnya dengan bujukan-bujukan atau tawaran-tawaran yang menjanjikan memberikan harapan perbaikan ke depan bagi para kader dan konstituen, maka kader-kader akan tertarik dan merasa tidak diinstruksi atau diperintah. Harapan-harapan yang telah disampaikan kepada konstituen hendaknya

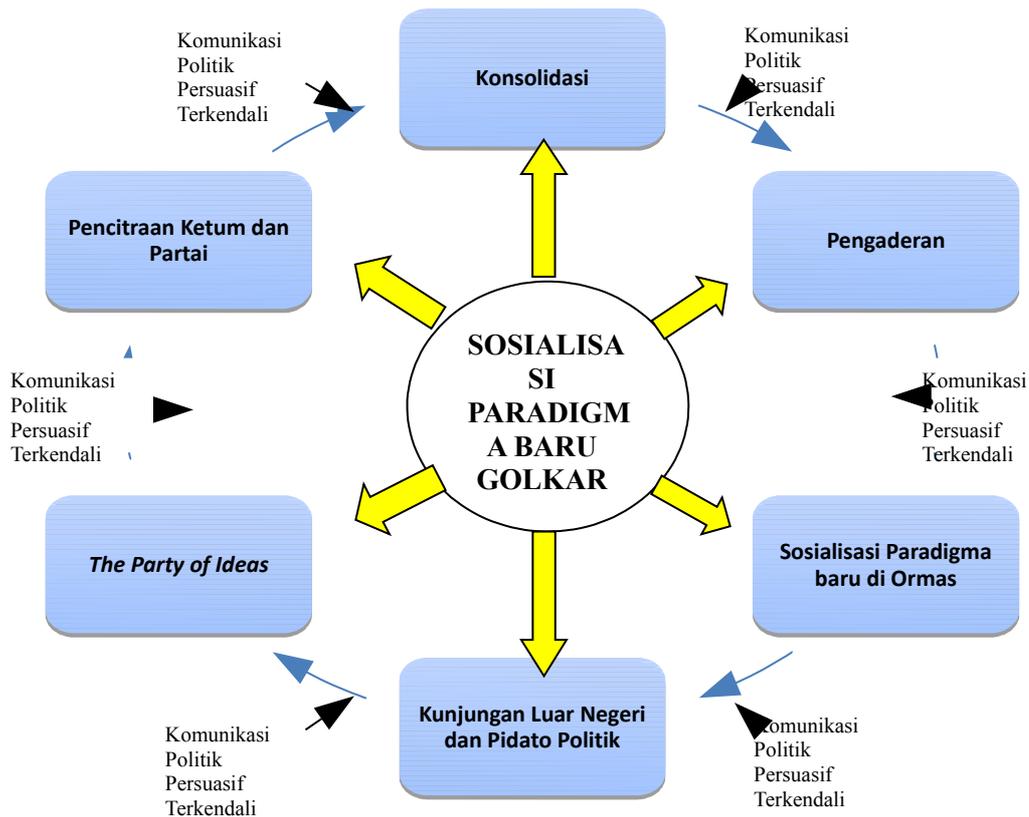
konsisten perwujudannya diupayakan para pengurus Partai Golkar, karena konsistensi itu untuk mengikat kepercayaan kader.

Pidato politik Ketua Umum yang biasa disampaikan dalam berbagai momen berusaha memperkenalkan Partai Golkar secara persuasif kepada para kader Partai Golkar dan masyarakat luas, namun tentu saja pidato-pidato yang disampaikan sebelumnya juga sudah dikendalikan dan disiapkan melalui pengkajian secara matang agar dapat memengaruhi atau mengubah opini masyarakat, sehingga terbentuk citra positif tentang Partai Golkar masa kepemimpinan sekarang ini. Seperti yang dijelaskan Arifin (2006) bahwa, komunikasi politik salah satu tujuannya adalah membangun citra positif bagi khalayak. Citra politik terbangun atau terbentuk berdasarkan informasi yang diterima, baik secara langsung ataupun melalui media politik. Komunikasi politik persuasif terkendali dapat dilihat pada gambar 5.

Model Komunikasi Politik Banyak Wajah dalam Proses Implementasi Paradigma Baru Partai Golkar (Multi Face Political Communication Model)

Sebagai partai berpengalaman dan tentu saja dengan berbagai kepentingan layaknya sebuah partai politik, menjadikan Partai Golkar tampak lebih fleksibel dalam melakukan implementasi paradigma barunya, sesuai dengan pendapat McLaughlin yang mengartikan implementasi, sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan (Nurdin dan Usman, 2002). Artinya Partai Golkar dapat beradaptasi di berbagai ranah politik, karena Partai Golkar ditunjang dengan sumber daya manusia yang relatif berpengalaman, maka penampilan kader-kader Partai Golkar seringkali mendominasi dan meramaikan persidangan-persidangan di parlemen.

Kepercayaan diri yang dibangun Partai Golkar terhadap kader-kadernya menjadikan Partai Golkar tidak ragu-ragu lagi mendistribusikan kekuasaannya secara merata tidak terpusat pada satu kekuatan penentu kebijakan. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki Partai Golkar memungkinkan partai ini dapat



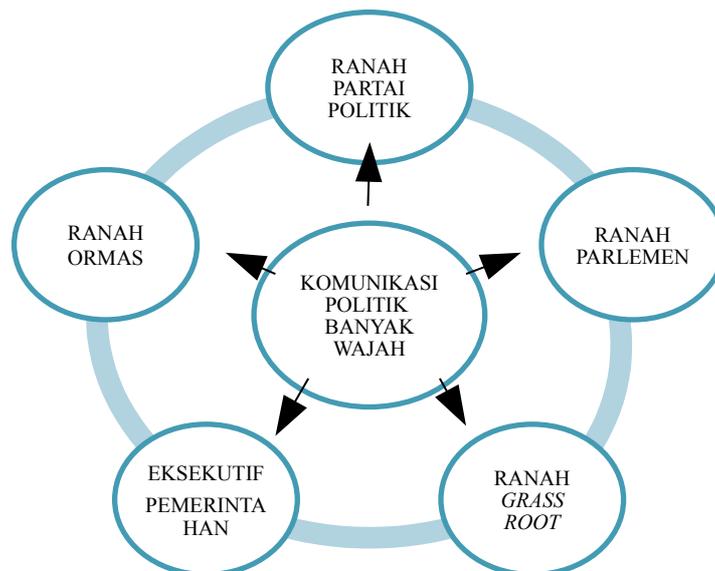
Sumber: hasil penelitian

Gambar 5
Model Komunikasi Politik Persuasif Terkendali

memainkan peran politiknya dengan fleksibel, tidak dengan peran-peran yang terbatas. Dengan model komunikasi ini, Partai Golkar dapat berinteraksi dengan pihak-pihak eksternal partai secara mudah, karena Partai Golkar memiliki kemampuan bernegosiasi dengan menawarkan program-program kerjasama sesuai dengan kemauan individu ataupun suatu partai politik tertentu. Fleksibilitas kader-kader Partai Golkar dapat disaksikan dalam peran komunikasi politiknya di parlemen yang sering tampil dengan wajah-wajah yang variatif. Sikap kritis Partai Golkar ini menunjukkan sebagai partai yang mampu berada di dua katup wajah yang berbeda dan Partai Golkar mampu bermain di antara dua katup wajah tersebut. Satu sisi Partai Golkar masuk anggota koalisi dan mendapat jatah menteri dan di sisi lain dengan sikap kritisnya, Partai Golkar berusaha mendongkrak popularitasnya,

dengan meyakinkan publik, bahwa Partai Golkar adalah partai yang selalu berusaha menjadi penghubung dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas, seperti yang dijelaskan Kantaprawira (1984) bahwa, fungsi komunikasi politik adalah sebagai jembatan penghubung bagi berbagai kepentingan masyarakat secara umum dengan pemerintah.

Fleksibilitas kader-kader Partai Golkar terlihat juga ketika kader-kader Partai Golkar terbelah setelah Munas 2009 di Pekanbaru, perpecahan kader Partai Golkar tidak membawa implikasi yang membawa kepada kehancuran Partai Golkar, karena kader Partai Golkar mampu hidup di organisasi apa saja, kelompok Surya Paloh yang tidak masuk kepengurusan Aburizal Bakrie mencari alternatif dengan mendirikan Ormas Nasdem dan mereka terus beraktivitas di organisasi barunya tersebut. Selain mereka masih banyak lagi kader-kader Partai Golkar yang



Sumber: hasil penelitian

Gambar 6
Model Komunikasi Politik Banyak Wajah

pindah ke partai-partai lain, mereka rata-rata bisa eksis dan diperhitungkan karena mereka mampu beradaptasi dengan komunitas barunya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa, kader-kader Partai Golkar mampu menampilkan wajahnya di manapun berada. Sebagai partai yang responsif terhadap berbagai kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka Partai Golkar dituntut juga untuk menampilkan diri dengan wajah yang santun, mengayomi, dan memberikan bimbingan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Model komunikasi politik banyak wajah ditampilkan dalam gambar 6.

PENUTUP

Simpulan

Sosialisasi paradigma baru dilakukan Partai Golkar di berbagai tempat dan kegiatan, di antaranya adalah melalui kegiatan konsolidasi internal partai. Sosialisasi paradigma baru dilakukan Partai Golkar dalam berbagai kegiatan konsolidasi yang bisa dijadikan momen untuk transformasi nilai-nilai paradigma baru.

Partai Golkar memiliki infrastruktur partai yang kuat, sehingga memudahkan

untuk melakukan sosialisasi paradigma baru di lingkungan internal partainya, namun Partai Golkar belum sepenuhnya dapat menghapus stigma yang memandang Partai Golkar sebagai mesin politiknya Orde Baru yang ikut berperan terhadap munculnya krisis multi dimensi pada akhir pemerintahan presiden Soeharto. Sosialisasi paradigma baru juga masih terganjal oleh kasus Lumpur Lapindo, sehingga Partai Golkar masih kesulitan untuk memulihkan citra Ketua Umumnya. Sosialisasi paradigma baru Partai Golkar ini dilakukan secara integratif, sistematis, dan kontinyu ditujukan kepada seluruh kader dari berbagai level mulai tingkat pusat sampai desa. Adapun model komunikasi yang digunakan dalam sosialisasi paradigma baru ini adalah Model Komunikasi Politik Persuasif Terkendali.

Paradigma baru berupaya diimplementasikan dalam berbagai kegiatan komunikasi politik. Implementasi demokratisasi dilakukan Partai Golkar dalam pemilihan Ketua Umum, pemilihan ketua DPD Partai Golkar, proses pemilihan calon presiden dan calon kepala daerah. Soliditas dan kekuatan Partai Golkar dapat dilihat dengan kemenangannya dalam Pemilu yang mencapai di atas 50 persen dan Partai

Golkar juga memiliki potensi-potensi kekuatan yang dapat diperhitungkan untuk bertarung dalam Pemilu tahun 2014. Ketika mengimplementasikan paradigma barunya, Partai Golkar berhadapan dengan realitas politik yang sarat dengan berbagai pertimbangan dan kepentingan kekuasaan, Partai Golkar tidak bisa menampilkan komunikasi politiknya secara statis dengan arah yang berhadap-hadapan, sehingga Partai Golkar terkondisikan untuk melakukan komunikasi politik dengan peran banyak wajah, artinya Partai Golkar harus fleksibel dalam menyahuti persoalan-persoalan kontemporer terkait dengan kepentingan partai dan kepentingan masyarakat. Model ini oleh penulis disebut dengan Model Komunikasi Politik Banyak Wajah (*Political Communication Multi Face Model*)

Saran

Penelitian tentang pembaharuan partai, masih terbuka kemungkinannya untuk ditindaklanjuti dengan tinjauan dari aspek ataupun objek partai yang lain, karena ranah kajian komunikasi politik ini begitu luas, sehingga masih banyak aspek-aspek lain yang belum tersentuh. Penelitian tentang perubahan paradigma partai ini penting dan perlu untuk ditindaklanjuti, karena perubahan paradigma suatu partai akan diikuti oleh perubahan *output* kader dari suatu partai politik tersebut.

Era reformasi sekarang ini, bagi partai-partai politik yang masih memakai doktrin-doktrin lama yang sudah tidak relevan lagi untuk pengembangan partai secara modern, setiap partai politik hendaknya memiliki keberanian untuk melakukan pembaharuan, sehingga partai-partai tersebut akan memiliki nilai tawar di mata konstituen. Bagi Partai Golkar sendiri semangat pembaharuan partai yang telah dicetuskan mulai tahun 1988, perlu dijaga dan terus dikoreksi sosialisasi dan implementasinya, supaya tidak menyimpang dan tidak kembali lagi menjadi partai yang berkarakter Orde Baru.

Sosialisasi paradigma baru hendaknya dilakukan dengan menunjukkan kesalahan struktural dan kesalahan kultural, yakni

kesalahan yang ditunjukkan dalam kegiatan organisasi partai dan kesalahan yang ditunjukkan dalam perilaku kader secara individu dalam komunitas masyarakatnya, untuk menumbuhkan kepercayaan dan simpati masyarakat, maka Partai Golkar harus membuktikannya dengan kebijakan-kebijakan pro rakyat dan perilaku terpuji yang harus selalu ditunjukkan oleh kader-kader Partai Golkar. Potensi-potensi yang selama ini dimiliki Partai Golkar tidak akan banyak berarti dalam masyarakat, apabila tidak ditunjang dengan itikad baik dan moralitas kadernya.

Demokratisasi sebagai bagian agenda pembaharuan Partai Golkar hendaknya diterapkan secara konsisten, sudah saatnya Partai Golkar berupaya secara serius menghapuskan praktik-praktik politik uang dalam berbagai agenda pemilihan para pimpinannya mulai tingkat pusat sampai daerah. Apabila Partai Golkar masih tetap terbelenggu dengan kepentingan politik instan, hanya mengejar jabatan dan uang, maka Partai Golkar akan kembali jatuh ke dalam kubangan pragmatisme, yang justru akan menghancurkan eksistensinya yang selama ini dipertahankan dan diperjuangkan dengan susah payah.

Kemandirian Partai Golkar menjadi dipertanyakan ketika Partai Golkar tidak punya keberanian secara tegas mengambil posisi di luar lingkaran kekuasaan pemerintahan dan berdiri tegak sebagai partai oposisi, Partai Golkar justru memilih sikap dualisme antara koalisi dan oposisi. Partai Golkar harus belajar menghadapi realitas politik dengan tetap memerhatikan kepentingan rakyat, bila rakyat membutuhkan Partai Golkar untuk berposisi sebagai penyeimbang kekuasaan, maka Partai Golkar mestinya mendahulukan kepentingan rakyat dari pada mendahulukan kepentingan jabatan dan partainya.

Soliditas Partai Golkar sempat terganggu pasca Munas 2009, sehingga perpecahan antartokoh Partai Golkar tidak bisa terelakan, padahal tokoh-tokoh senior tersebut merupakan aset berharga bagi Partai Golkar, maka kepengurusan Partai Golkar saat ini hendaknya berupaya menyatukan

kembali dengan cara melakukan konsolidasi, mengadakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan mengajak kembali untuk memikirkan kepentingan Partai Golkar yang merupakan aset bangsa yang harus dijaga eksistensinya. Kepengurusan Partai Golkar saat ini juga harus memerhatikan masukan-masukan dari tokoh-tokoh tersebut, tidak jalan sendiri apalagi memaksakan kehendaknya dalam setiap pengambilan kebijakan.

Kekuatan Partai Golkar yang selama ini ditunjukkan oleh beberapa hasil survei yang menyatakan bahwa, Partai Golkar memiliki peluang besar untuk memenangkan Pemilu mendatang. Potensi kemenangan tersebut tentu harus dipertahankan dengan soliditas dan kerja keras partai mulai tingkat pusat sampai desa. Partai Golkar harus menjaga betul terhadap keutuhan partai, sehingga para pengurus pusat hendaknya lebih rajin lagi untuk memantau atau turun ke daerah-daerah untuk melihat perkembangan partai dalam melakukan konsolidasi dan menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh pengurus daerah.

Sebagai partai yang responsif dan berakar, maka Partai Golkar harus peka terhadap dinamika masyarakat dengan memerhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat terutama kalangan bawah. Partai Golkar harus hadir, setiap masyarakat membutuhkan, sehingga akan timbul kepercayaan dan simpati masyarakat yang akhirnya mereka akan memilih Partai Golkar dalam Pemilu 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arifin, Anwar. (2006). *Pencitraan dalam Politik: Strategi Pemenangan Pemilu dalam Persepektif Komunikasi Politik*. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Budiardjo, Miriam dkk. (2005). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Universitas terbuka.
- Cangara, Hafied. (2009). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta:

Rajawali Press.

- Denzin, K. Norman and Lincoln, Yvonna. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. London-New Delhi: Sage Publications Inc.
- Effendy, Onong Uchjana. (1986). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remadja Karya.
- Kaid, Lynda Lee dan Christina Holtz-Bacha. (2008). *Encyclopedia of Political Communication*. Volume 1 & 2. California: SAGE Publication.
- Koentjaraningrat dkk. (1984). *Kamus Istilah Antropologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Nimmo, Dan. (2000). *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan, dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syam, Nina Winangsih. (1992). *Sosiologi Komunikasi*. Bandung: Humaniora
- Soemarno AP. (2002). *Komunikasi Politik*. Jakarta: Pusat Penerbitan UT.
- Tandjung, Akbar. (2007). *The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- West, Richard dan Lynn H. Turner. (2008). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Terjemahan Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika.

Sumber lainnya:

Dokumen:

- AD/ART dan Peraturan Organisasi Partai Golkar. (2003). Jakarta: DPP Partai Golkar.
- Hasil Munas VIII Partai Golkar Tahun 2009 “Suara Golkar, Suara Rakyat”. Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, tahun 2009.
- Hasil Rakernas Partai Golkar 2010 “Suara Golkar Suara Rakyat” Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tahun 2010.
- Hasil Keputusan Rapimnas I Partai Golkar di Jakarta tanggal 17-19 Oktober 2010.
- Kumpulan PO, Juklak dan Keputusan DPP

Partai Golkar 2009-2015. Sekretariat Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Tahun 2010

Implementasi. Tersedia dalam <<http://www.muniryusuf.com/tag/pengertian-implementasi>>. Diakses tanggal 1 Oktober 2012.

Internet:

Yusuf, Munir. (2012). *Pengertian*